

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Sahrul Ponto¹, Fajar Rina Sejatiz², Ruli Ariyaningrum³

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua
sahrul165ponto@gmail.com

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua
aviccennasejati@gmail.com

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total *Quality Management* terhadap Penerapan *Good Governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner pada OPD Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Sampel yang diperoleh sebanyak 92 responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* (2) Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* (3) Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* (4) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* (5) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* (6) Total *Quality Management* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.

Kata Kunci: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Total *Quality Management*, Penerapan *Good Governance*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh persiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme [1]. Selanjutnya, *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi oleh prinsip-prinsip dan

karakteristik tertentu [2]. Penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling memiliki keterkaitan [3]. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, di samping tuntutan dari masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Masalah birokrasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan *Good Governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *Good Governance* di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program

yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaedah *Good Governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik.

Peningkatan kinerja merupakan salah satu dasar dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi [4]. Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran/tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah tersebut. Keberhasilan sebuah organisasi pemerintahan selain diukur dengan persepektif kinerja juga dapat diukur dengan melihat persepektif pengelolaan keuangannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat maka dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan. Sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Organisasi pemerintahan juga memerlukan adanya sistem pengendalian intern yang baru. Sistem pengendalian pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan yang sudah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan didalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan kinerja pemerintah serta adanya peningkatan kualitas melalui implementasi lima elemen pengendalian intern yang dijelaskan pada PP No.60 tahun 2008 yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Peran implementasi standar akuntansi pemerintah di dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik terdapat didalam kategori penyusunan laporan keuangan. Untuk menggambarkan kualitas informasi keuangan, khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan SAP. Hal tersebut akan berdampak pada pemberian opini, yang akan mengakibatkan penilaian yang dilakukan oleh

BPK sebagai badan profesional yang independen terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Apabila penyusunan laporan keuangan tidak memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku, maka informasi yang disajikan akan tidak reliabel dan andal, sehingga berdampak pada penilaian secara keseluruhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tingginya kasus korupsi di Indonesia (Indeks Persepsi Korupsi, 2017), menjadi sebuah fenomena menarik untuk diangkat dalam penelitian ini. Jika melihat data, Indonesia berada di peringkat ke-96 bersama Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia. Di Asia Tenggara Indonesia berada di bawah Singapura (6), Brunei Darussalam (32), Malaysia (62), dan bahkan Timor Leste (91). Di bawah Indonesia terdapat Filipina (111), Myanmar (130), Laos (135), dan Kamboja (161).

<https://internasional.kompas.com/read/2018/02/26/14444501/indeks-persepsi-korupsi-2017-peringkat-indonesia-di-bawah-timor-leste>.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja adalah istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan, pertanggung jawaban manajemen dan sejenisnya [5]. Sekumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dengan kedudukan sebagai pegawai negeri merupakan Aparat Sipil Negara.

2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah adalah semua hak kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tertentu.

2.3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen [6]. Definisi sistem pengendalian internal pemerintah tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

2.4. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Keterbatasan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang di terbitkan (Nugraha, 2009). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Tujuan dari PSAP ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas [7].

2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya [8]. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan kompetitif, informasi telah menjadi aktiva tidak berwujud, yang jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk meningkatkan sumber-sumber perusahaan lainnya.

2.6. Total Quality Management

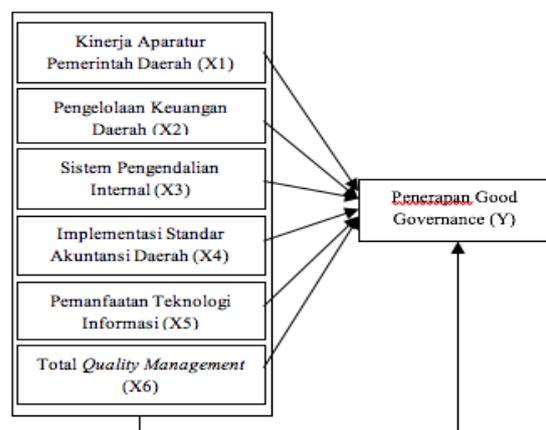
Menurut *International Organization for Standardization* (ISO) Natha (2008) TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan

didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi (sumber daya manusianya) dan masyarakat.

Tujuan utama TQM adalah untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa memproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan keperluan pelanggan.

2.7. Penerapan Good Governance

Good governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konsep

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik

tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen – elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan [9]. Populasi penelitian ini adalah pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati – hati dari populasi tersebut [9]. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian.[4] Untuk kriteria karakteristik sampel akan diambil tiga responden dengan kriteria:

- 3.1.1. Kepala Dinas
- 3.1.2. Kasubag Keuangan
- 3.1.3. Bendahara

3.2. Definisi Operasional Variabel

Pengertian dari masing–masing variabel diatas adalah sebagai berikut:

3.2.1. Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah seperangkat proses untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai dan bagaimana mengatur orang dengan cara yang tepat untuk meningkatkan tercapainya tujuan visi dan misi pemerintah daerah. Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah:

- 3.2.1.1. Indikator masukan (*input*)
- 3.2.1.2. Indikator proses
- 3.2.1.3. Indikator keluaran (*output*)
- 3.2.1.4. Indikator hasil (*outcome*)
- 3.2.1.5. Indikator manfaat (*benefit*)
- 3.2.1.6. Indikator dampak (*impact*)

3.2.2. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah Ditinjau dari aspek administrasi, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaiakan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Berikut ini indikator Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 3.2.2.1. Perencanaan
- 3.2.2.2. Pelaksanaan
- 3.2.2.3. Penatausahaan
- 3.2.2.4. Pelaporan
- 3.2.2.5. Pertanggungjawaban
- 3.2.2.6. Pengawasan

3.2.3. Variabel Sistem Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal pemerintah meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikut ini indikator Sistem Pengendalian Internal:

- 3.2.3.1. Lingkungan Pengendalian
- 3.2.3.2. Penilaian Resiko
- 3.2.3.3. Aktivitas Pengendalian
- 3.2.3.4. Informasi dan Komunikasi
- 3.2.3.5. Pemantauan

3.2.4. Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keungan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Berikut indikator Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan:

- 3.2.4.1. Efisiensi dan Efektifitas
- 3.2.4.2. Pengendalian Fiskal
- 3.2.4.3. Akuntabilitas
- 3.2.4.4. Pengambilan Keputusan
- 3.2.4.5. Mereformasi Sistem
- 3.2.4.6. Transparansi

3.2.5. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya [8]. Berikut ini indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi:

- 3.2.5.1. Transparansi
- 3.2.5.2. Akuntabilitas
- 3.2.5.3. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan

3.2.6. Variabel *Total Quality Management*

Menurut *International Organization for Standardization* (ISO) Natha (2008) TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi (sumber daya manusianya) dan masyarakat. Berikut ini indikator *Total Quality Management*:

3.2.6.1. Berfokus pada kepuasan publik

3.2.6.2. Pemberdayaan dan pelibatan karyawan

3.2.6.3. Peningkatan kualitas secara berkelanjutan

3.2.7. Variabel Dependen Penerapan *Good Governance*

Penerapan *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berikut ini indikator Penerapan *Good Governance*:

3.2.7.1. Partisipasi

3.2.7.2. Aturan Hukum

3.2.7.3. Transparansi

3.2.7.4. Daya Tanggap

3.2.7.5. Berorientasi Konsensus

3.2.7.6. Berkeadilan

3.2.7.7. Efektifitas dan Efisiensi

3.2.7.8. Akuntabilitas

3.2.7.9. Bervisi strategi didalam pelaksanaannya

3.3. Uji Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah pernyataan dalam kuesioner telah sesuai mengukur konsep yang dimaksud. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan skor total. Hasil uji validitas atas variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (X_1), Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2), Sistem Pengendalian Internal (X_3), Implementasi Standar Akuntansi Daerah (X_4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_5), Total *Quality Management*

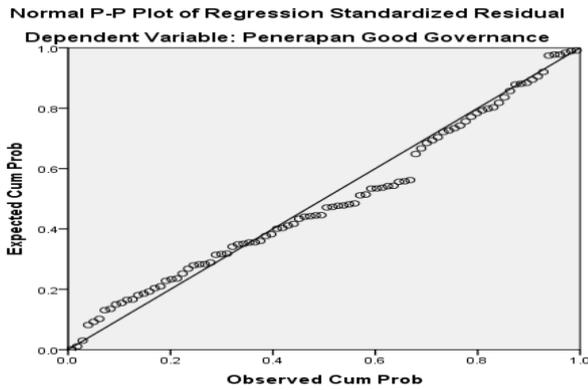
(X_6), dan Penerapan *Good Governance* (Y) menunjukkan bahwa nilai r-hitung seluruh butir pernyataan variabel penelitian lebih besar dari r-tabel, $\alpha = 0,211$. Selain itu semua item pernyataan untuk variabel penelitian memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian, hasil uji validitas menyatakan bahwa semua butir pernyataan dari instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis di dalam penelitian ini adalah valid.

3.4. Uji Reliabilitas

Kuesioner reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* untuk variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebesar 0,957, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,724, variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,833, variabel Implementasi Standar Akuntansi Daerah sebesar 0,791, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,937, variabel Total *Quality Management* sebesar 0,768, variabel Penerapan *Good Governance* sebesar 0,768. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliable* karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized* $> 0,70$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pernyataan diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

3.5. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S) dan grafik P-Plot SPSS. Melalui grafik P-Plot dapat dinilai dari titik-titik penyebaran disekitar garis diagonal apakah searah dan mengikuti garis diagonal, sedangkan pada Uji K-S akan dilihat nilai signifikansinya apabila lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, nilai signifikansi hasil Uji K-S yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa sebaran data tidak normal.



Gambar 2
Grafik Normal P-P Plot

Terlihat bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1
Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99531439
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.713
Asymp. Sig. (2-tailed)		.690

Uji Kolmogorov–Smirnov Test terlihat lebih besar alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.6. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1 maka variabel independen terbebas dari persoalan multikolinieritas. Regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Tabel 2.
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.173	5.794
Pengelolaan Keuangan Daerah	.351	2.847
Sistem Pengendalian Internal	.337	2.970
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.762	1.313
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.164	6.099
Total Quality Management	.595	1.680

Berdasarkan pada Tabel diatas hasil uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hasil tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 0,10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

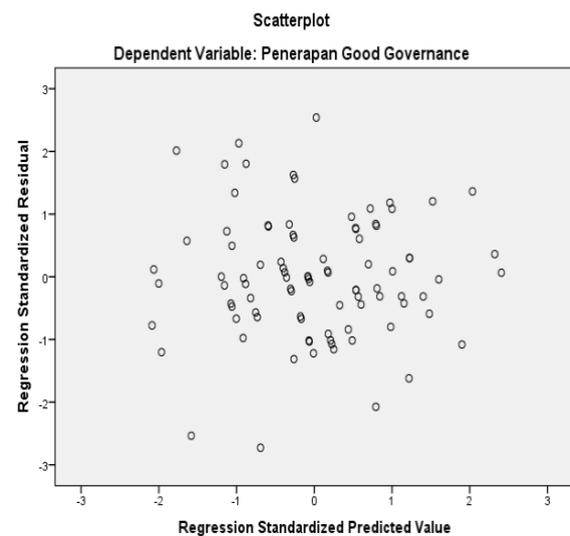
3.7. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, maka disebut terjadi homokedastisitas, dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas [10]. Pengujian heteroskedastisitas dalam kajian ini adalah dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafik *scatterplot* yang kriterianya yaitu;

3.7.1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastistas. Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:



Gambar 3
Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar diatas dapat disimpulkan bebas heterokedastisitas sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi tingkat penerapan *good governance* berdasarkan masukan variabel bebas atau independennya yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan *total quality management*.

3.8. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, *total quality management* terhadap variabel terikat penerapan *good governance* maka perlu dilakukan Uji t. Pengujian secara parsial dapat dilihat dari Uji t, apabila nilai probabilitasnya $< 0,05$, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	t	Sig.
(Constant)	.641	.524
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	4.061	.000
Pengelolaan Keuangan Daerah	-1.649	.103
1 Sistem Pengendalian Internal	1.719	.089
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan	24.097	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.870	.005
Total Quality Management	-.230	.818

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil pengujian hipotesis pertama terbukti Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua. Artinya dengan semakin baik Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah maka akan meningkatkan kualitas dari Penerapan *Good Governance*.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [4], [11], yang menyatakan

bahwa kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

4.2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil pengujian hipotesis kedua terbukti Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum optimal, maka hal tersebut akan berdampak pada Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua. Pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat menunjang keberhasilan dalam penerapan *good governance* itu sendiri. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Namun realita menunjukkan berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini disebabkan karena adanya faktor antara lain dalam sistem pengawasan yang kurang optimal sehingga berdampak dalam hal menetapkan dan mensosialisasikan sasaran dan tujuan kegiatan dalam lingkup pemerintah/OPD.

Hal ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga telah terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dari tahun 2011 hingga 2017. Temuan itu pun telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Senin (5/3/2018) lalu. Detik.com (2018).

Berdasarkan uji t yang diperoleh oleh variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari [4], [12], [3], [11] yang menyatakan bahwa variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil pengujian hipotesis ketiga terbukti Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan

Good Governance Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika Sistem Pengendalian Internal yang belum optimal, maka hal tersebut akan berdampak pada Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Pengendalian Internal diperlukan untuk mengetahui apakah dalam hal Penerapan *Good Governance* itu sendiri sudah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis serta memastikan apakah sudah sesuai dengan visi, misi, tujuan serta target dalam operasi organisasi tersebut. Mengetahui bahwa pemerintahan yang baik dan bersih dapat diukur dari *performance* aparaturinya. Namun berdasarkan realita menunjukkan bahwa pelayanan birokrasi masih merupakan hal yang mahal dan langka. Terkait hal untuk mendapatkan pelayanan, seringkali harus dikenai biaya tambahan serta kurang efektif dan efisien dalam pengerjaan tugasnya. Ketepatan waktu dalam hal penyelesaian tugas tentu akan berdampak dalam Penerapan *Good Governance* itu sendiri. Dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah daerah yang tidak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan prinsip dasar *Good Governance*.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [11], dan [4] yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

4.4. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil pengujian hipotesis keempat terbukti Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah baik, maka akan berdampak pada Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam hal Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah itu sendiri menerapkan keteraturan dalam prosesnya yang disusun berdasarkan aturan yang berlaku pada pemerintahan, yang akan mempengaruhi bentuk tatanan dalam penyajiannya yang nantinya akan berguna untuk salah satunya sebagai pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan unsur *good*

governance yang berlaku untuk point mewujudkan akuntabilitas.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* [4].

4.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil pengujian hipotesis kelima terbukti Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* pemerintah provinsi papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika Pemanfaatan Teknologi Informasi baik, maka akan berdampak pada Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam hal pemanfaatan teknologi bermanfaat dalam proses bekerja, terutama melihat dari segi fungsionalnya dalam sebuah organisasi yang dapat menunjang efektif dan efisiennya pekerjaan yang dilakukan. Nampak dari seiring perkembangan zaman dimana tingkat ketergantungan manusia akan teknologi khususnya komputer di era sekarang semakin tinggi dikarenakan banyak pekerjaan yang mayoritas sistem pengerjaannya menggunakan komputer. Sehingga Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat berpengaruh dalam Penerapan *Good Governance*.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap penerapan *good governance* [13].

4.6. Pengaruh Total Quality Management Terhadap Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil pengujian hipotesis keenam terbukti Total *Quality Management* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* pemerintah provinsi papua. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika Total *Quality Management* belum optimal dilakukan, maka akan berdampak pada Penerapan *Good Governance* Pemerintah Provinsi Papua.

Hal ini karena dalam pengoptimalan kepuasan masih melalui perbaikan proses yang berkesinambungan. Karena dalam hal

penilaian kepuasan adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya [13] menyatakan bahwa variabel *total quality management* berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 5.1.1. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.
- 5.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.
- 5.1.3. Sistem Pengendalian Internal terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.
- 5.1.4. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.
- 5.1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.
- 5.1.6. *Total Quality Management* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.
- 5.1.7. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Total Quality Management* terbukti berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerapan *Good Governance* Provinsi Papua.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam pengoptimalan penerapan *good governance* pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat

diwujudkan dan diterapkan dengan baik melalui pendekatan variabel yang telah diteliti dan diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kualitas dalam penerapan *good governance*.

- 5.2.2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature dengan melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing dalam pencapaian tujuan yang lebih optimal.
- 5.2.3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam penelitian dengan menambahkan variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penerapan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. S. Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- [2] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.: Andi Offset, 2004.
- [3] Syafrion, “pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance*,” *J. Ekon.*, vol. Volume 2 N, no. september, pp. 1–14, 2015.
- [4] Dhiyavani, “Pengaruh Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*,” vol. Volume 4 N, pp. 1859–1872, 2017.
- [5] I. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketii. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [6] Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN, 1993.
- [7] B. A. B. Ii and T. Pustaka, “No Title,” pp. 10–25, 2013.
- [8] K. R. McKeown *et al.*, “PERSIVAL, a system for personalized search and summarization over multimedia healthcare information,” *JCDL '01 Proc. 1st ACM/IEEE-CS Jt. Conf. Digit. Libr.*, 2001.
- [9] Rasyid dan Yamin, *Metodologi Penelitian*. 2012.
- [10] D. Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*, Edisi

- Kesa. Yogyakarta: Andi, 2012.
- [11] D. O. Ruspina, “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintah Kota Padang),” no. September, pp. 1–27, 2013.
- [12] N. M. A. Ristanti, N. K. Sinarwati, and E. Sujana, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance,” *J. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2014.
- [13] E. Suryandari F, “Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total Quality management Terhadap Penerapan Good Governance di Lembaga Amil Zakat,” *J. Akunt. dan Investasi*, vol. Volume 16, no. 2, pp. 145–154, 2015.